OPTIMALISASI PROGRAM REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Muhammad Syahreza R
NPP. 33.0272
Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Menejemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: abangeja75@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ida Yunari Ristiani, SKM., M.M.
Email: idayunarir@ipdn.ac.id

ABSTRACT

***Problem Statement**: The author focuses on the problem of lack of attention and sustainability in psychological recovery compared to post-earthquake physical rehabilitation. Ideally, psychosocial support requires long-term and comprehensive interventions, however, the factual condition in Bengkulu City shows that the psychosocial rehabilitation program operates on an emergency basis, lacks specific funding allocations, and lacks the availability of permanent psychologists. **Purpose**: This study aims to analyze the optimization of the psychosocial rehabilitation program for earthquake victims in Bengkulu City. **Method**: This study uses a qualitative descriptive method to analyze the optimization stages according to Siringoringo Theory. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques, involving 10 affected residents and 4 key agency apparatuses. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, followed by source triangulation to ensure data validity. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model—comprising data reduction, display, and conclusion drawing—and computationally processed using NVivo 15 software for systematic coding and visualization. **Result**: This study found that the optimization of the program yields varied results across its three dimensions. In the goal dimension, the program is highly responsive, successfully recovering the psychological conditions of 80% of victims and improving their quality of life, indicated by reduced anxiety and the return of residents' social activities. The satisfaction level reached 90% due to humanistic approaches like group counseling, spiritual motivation, and communal activities. In the alternative decision dimension, implementers effectively established targeted methods such as children's play therapy, home visits, disaster simulations, the establishment of integrated posts for 7 days, and strong cross-sector synergy (Social Service, Ministry of Social Affairs, BPBD, Police). Meanwhile, in the limiting resources dimension, Hierarchy Chart analysis confirmed that the absence of permanent psychologists at the Social Service is the biggest constraint. Furthermore, the lack of a specific APBD budget forced the program to rely on local donors, exacerbated by inadequate permanent counseling facilities for long-term monitoring. **Conclusion**: This study concludes that the psychosocial rehabilitation program for earthquake victims in Bengkulu City has been effective in short-term emergency handling, but is not yet optimal in terms of sustainability. It is recommended to allocate*

permanent funds in the APBD, recruit local psychologists, and integrate the program into the Regional Disaster Management Plan (RPBD) to realize independent services in Bengkulu City.
Keywords: *Sustainability, Earthquake Victims, Disaster Recovery, Psychosocial Rehabilitation, Trauma Healing*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya perhatian dan keberlanjutan pada pemulihan psikologis jika dibandingkan dengan rehabilitasi fisik pascabencana gempa bumi. Secara ideal, dukungan psikososial memerlukan intervensi yang berjangka panjang dan komprehensif, akan tetapi kondisi faktual di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa program rehabilitasi psikososial berjalan secara darurat, tidak memiliki alokasi pendanaan khusus, serta minimnya ketersediaan tenaga psikolog yang permanen. **Tujuan**: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi program rehabilitasi psikososial korban bencana gempa bumi di Kota Bengkulu. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap tingkat optimalisasi menurut Teori Siringoringo. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, yang melibatkan 10 warga terdampak dan 4 aparatur kunci. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman yang diolah menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk proses *coding* dan visualisasi. **Hasil/Temuan**: Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi program memberikan hasil bervariasi pada tiap dimensinya. Pada dimensi tujuan, program sangat responsif memulihkan kondisi psikis 80% korban dan meningkatkan kualitas hidup mereka, ditandai menurunnya kecemasan dan kembalinya aktivitas warga. Tingkat kepuasan mencapai 90% berkat konseling kelompok, motivasi spiritual, dan kegiatan komunal. Pada dimensi alternatif keputusan, pelaksana efektif menetapkan terapi bermain anak, *home visit*, simulasi bencana, pendirian posko terpadu selama 7 hari, serta sinergi lintas sektor (Dinas Sosial, Kemensos, BPBD, Polri). Sementara itu, pada dimensi sumber daya yang membatasi, analisis *Hierarchy Chart* mengonfirmasi bahwa ketiadaan tenaga psikolog tetap di Dinas Sosial merupakan hambatan terbesar. Selain itu, ketiadaan anggaran khusus APBD membuat program terpaksa bergantung pada donatur lokal, diperparah oleh fasilitas konseling permanen yang belum memadai untuk pemantauan jangka panjang. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa program rehabilitasi psikososial korban bencana gempa bumi di Kota Bengkulu telah berjalan efektif pada penanganan darurat jangka pendek, namun belum optimal secara keberlanjutan. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya mengalokasikan dana tetap pada APBD, merekrut tenaga ahli psikolog lokal, serta mengintegrasikan program ke dalam Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) guna mewujudkan layanan yang mandiri di Kota Bengkulu.
Kata Kunci: Keberlanjutan, Korban Gempa, Pemulihan Bencana, Rehabilitasi Psikososial, Trauma Healing.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia karena terletak pada zona Cincin Api Pasifik, sehingga gempa bumi menjadi ancaman yang berulang dan berdampak luas bagi penduduk. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa sejak 2021 hingga 2025 terjadi peningkatan frekuensi gempa bumi merusak, dengan puluhan kejadian setiap tahun yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian dalam jumlah besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan penanggulangan bencana, bukan hanya pada fase tanggap darurat dan rekonstruksi fisik, tetapi juga pada pemulihan psikososial bagi para penyintas. Tren peningkatan kejadian gempa bumi merusak di Indonesia periode 2021–2025 dapat dilihat pada Gambar 1 :

Gambar 1.1
Banyak Kejadian Gempa Bumi yang Terjadi Di Indonesia Rentang Tahun 2021-2025

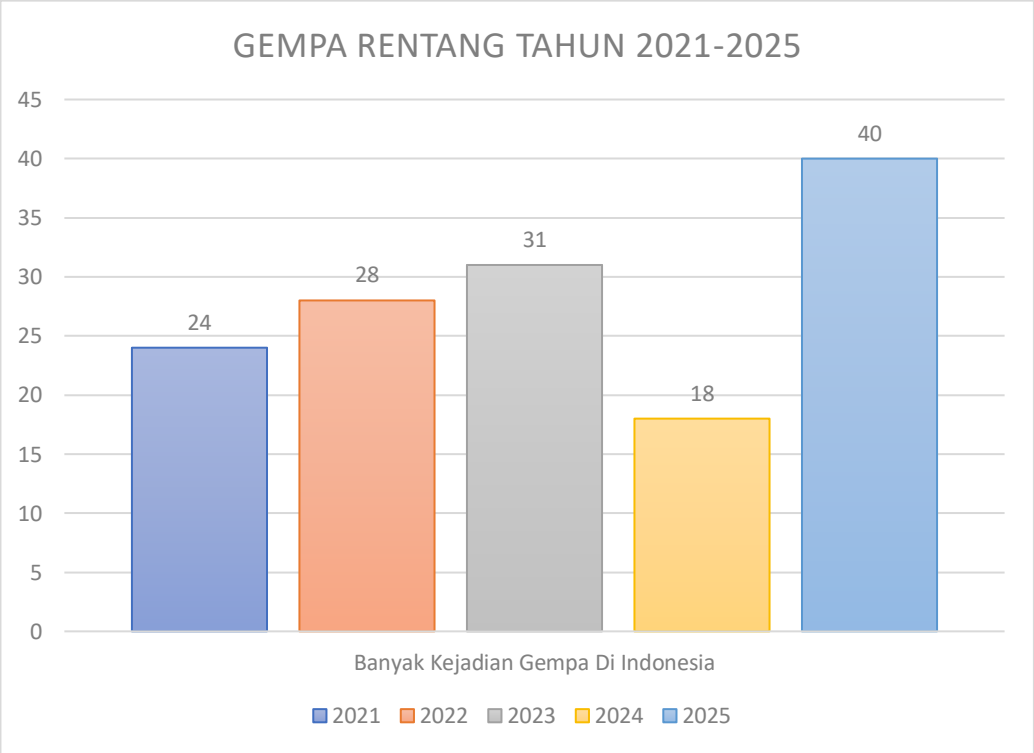

Sumber: Diolah Penulis dari BNPB 2025

Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak signifikan dari kejadian gempa bumi tersebut. Pada 23 Mei 2025, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kota Bengkulu dan menyebabkan kerusakan ratusan rumah serta ratusan jiwa terdampak, baik dalam bentuk luka, kehilangan harta benda, maupun gangguan pada aktivitas sosial sehari-hari. Selain kerusakan fisik, bencana ini juga memunculkan gangguan psikologis pada penyintas, seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, rasa takut berlebihan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Secara global, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penyintas gempa bumi mengalami gangguan stres pascatrauma, depresi, dan kecemasan dalam jangka waktu yang panjang apabila tidak memperoleh intervensi psikososial yang memadai (Çınaroğlu et al., 2025). Hasil meta-analisis terhadap berbagai intervensi psikologis pada penyintas gempa di Turki juga menunjukkan bahwa program intervensi yang terstruktur

dan berbasis bukti efektif menurunkan gejala PTSD, depresi, dan kecemasan korban(Çınaroğlu, 2025). Dampak psikis yang berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas hidup dan menghambat proses pemulihan sosial, terutama jika tidak diikuti intervensi rehabilitasi psikososial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berbagai kajian sebelumnya menegaskan pentingnya pendampingan psikososial sebagai bagian integral penanganan pascabencana. Penelitian Anggun Fergina dkk. (2024) di Cianjur menunjukkan bahwa pendampingan psikososial dan trauma healing melalui kegiatan bermain, seni, dan interaksi sosial efektif menurunkan gejala trauma pada anak-anak korban gempa. Yudha dkk. (2025) juga menemukan bahwa strategi trauma healing berbasis komunitas mampu memperkuat dukungan sosial dan mempercepat pemulihan psikologis anak di lokasi pengungsian. Korban yang mengalami gangguan perlu dibantu, agar mereka dapat memahami apa yang sedang mereka hadapi, dan mendampingi mereka agar dapat pulih seperti semula atauh bahkan lebih baik (Hardy et al., 2024). Di sisi lain, studi rekonstruksi pascabencana menyoroti perlunya sinergi lintas sektor antara BPBD, Dinas Sosial, dan aktor lokal dalam mengintegrasikan rehabilitasi fisik dan psikis korban secara lebih sistematis. Di Indonesia, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) memanfaatkan beragam strategi advokasi seperti lobi, kampanye publik, mobilisasi akar rumput, dan pembentukan koalisi untuk mendorong perubahan sosial maupun politik (Rusfiana & Kurniasih, 2024). Strategi pelibatan akar rumput dan koalisi semacam inilah yang krusial untuk diadaptasi dalam mempercepat pemulihan psikososial pascabencana di daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Sejumlah temuan menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi psikososial di tingkat daerah sering kali belum optimal. Studi awal di Dinas Sosial Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa program rehabilitasi psikososial yang dijalankan setelah gempa 23 Mei 2025 cenderung bersifat jangka pendek, berfokus pada aktivitas penghiburan sesaat, dan belum sepenuhnya menyediakan pendampingan psikologis berkelanjutan bagi korban. Permasalahan psikologis memerlukan tidakan berkelanjutan. Dukungan jangka Panjang sangat penting dalam pemulihan untuk pembentukan mental yang terluka, bukan hanya sekadar penanganan gejala psikologis sementara (Bany-mohammed et al., 2025).

Keterbatasan jumlah tenaga profesional, sarana pendukung, dan alokasi anggaran menyebabkan kegiatan rehabilitasi psikososial belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan penyintas, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga dengan kehilangan berat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara mandat normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana dengan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana program rehabilitasi psikososial bagi korban gempa bumi di Kota Bengkulu telah dioptimalkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun keberlanjutannya. Di satu sisi, kebijakan dan kerangka regulasi sudah mengakui pentingnya dukungan psikososial sebagai bagian dari rangkaian penanggulangan bencana. Namun di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, hingga mekanisme evaluasi dan pembiayaan jangka panjang. Di sinilah letak kebaruan ilmiah penelitian ini, yaitu mengkaji optimalisasi program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu dengan menempatkan pengalaman langsung penyintas dan aktor pelaksana sebagai sumber utama untuk menilai efektivitas, hambatan, dan peluang penguatan program.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai rehabilitasi psikososial bagi korban gempa bumi telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menjadi rujukan penting bagi penelitian ini. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan psikologis, kegiatan trauma healing, dan dukungan komunitas

berkontribusi pada pemulihan kondisi mental dan sosial penyintas, namun masing-masing memiliki fokus dan konteks yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Fergina dan rekan pada tahun 2024 mengulas pendampingan psikososial dan trauma healing pasca gempa di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana kegiatan pendampingan, terutama yang melibatkan anak-anak melalui aktivitas kreatif dan rekreasional, dapat membantu menurunkan kecemasan dan tekanan psikologis korban gempa. Temuan ini menunjukkan bahwa program pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologis penyintas, meskipun penelitian ini belum secara khusus menilai optimalisasi program dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Yudha dan rekan pada tahun 2025 meneliti pemulihan psikososial anak pasca gempa dengan menekankan strategi trauma healing berbasis komunitas. Dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada pengalaman langsung sebagai relawan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan sederhana seperti permainan, terapi kelompok ringan, dan interaksi sosial yang hangat dapat memperkuat rasa aman anak dan membantu mereka mengelola pengalaman traumatis. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa komunitas memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pemulihan psikososial, sedangkan penelitian di Kota Bengkulu mengarahkan perhatian pada penyelenggaraan program rehabilitasi psikososial yang difasilitasi secara formal oleh Dinas Sosial dan lembaga terkait.

Penelitian Leonardo Firmansyah dkk. (2023) berfokus pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dengan pendekatan kualitatif, mereka menganalisis bagaimana koordinasi lintas sektor antara BPBD, dinas teknis, dan lembaga lainnya berjalan dalam pelaksanaan rehabilitasi, termasuk aspek fisik, kesehatan, dan psikososial. Temuan mereka menyoroti bahwa keterbatasan data, birokrasi, dan lemahnya sosialisasi kebijakan menjadi hambatan dalam efektivitas program. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana tidak hanya ditentukan oleh adanya program, tetapi juga oleh pengelolaan sumber daya dan koordinasi antarinstansi, yang menjadi salah satu fokus analisis dalam penelitian ini melalui penggunaan teori optimasi.

Amal Ramadhani Putra dan Hayatul Khairul Rahmat pada tahun 2025 melakukan studi literatur yang membahas peran dukungan psikososial dalam membangun ketahanan mental pasca bencana. Mereka menekankan perlunya pedoman dan kebijakan yang merujuk pada standar internasional agar layanan rehabilitasi psikososial berjalan lebih terarah dan konsisten. Studi tersebut menunjukkan bahwa dukungan psikososial yang terstruktur dapat meningkatkan kemampuan individu dan komunitas untuk bangkit kembali setelah bencana. Penelitian ini sejalan dengan kajian di Kota Bengkulu dalam hal fokus pada efektivitas program rehabilitasi psikososial, namun penelitian di Bengkulu memberikan kontribusi tambahan dengan menelaah pengalaman langsung korban dan pelaksana program di satu wilayah spesifik.

Selain itu, penelitian Nadia Eka Saputri dan Atika Wijaya tahun 2025 menyoroti proses sosialisasi mitigasi bencana dalam keluarga terdampak gempa di Desa Limbangan Sari. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini menggambarkan bagaimana keluarga menjadi ruang awal penanaman pengetahuan, sikap, dan kebiasaan terkait kesiapsiagaan bencana, terutama bagi anak-anak. Temuan ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi psikososial dan upaya mitigasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial di tingkat keluarga dan komunitas, sehingga program formal perlu mempertimbangkan konteks tersebut.

Selain penelitian di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Thapa, Pathak, dan Pathak (2021) di Nepal menunjukkan bahwa pemulihan psikososial korban gempa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan

dukungan psikososial, dukungan komunitas, serta koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana. Temuan tersebut memperkuat urgensi optimalisasi program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu agar tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan dukungan psikologis bagi korban.

Melalui berbagai penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai rehabilitasi psikososial korban gempa selama ini banyak menekankan bentuk kegiatan trauma healing, peran komunitas, ketahanan mental, serta koordinasi lembaga dalam konteks pascabencana. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana program rehabilitasi psikososial yang dikelola Dinas Sosial di tingkat kota dioptimalkan dengan mempertimbangkan tujuan program, alternatif keputusan, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian tentang optimalisasi program rehabilitasi psikososial bagi korban gempa bumi di Kota Bengkulu hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pelaksanaan program, dampak yang dirasakan korban, serta keberlanjutan layanan dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji optimalisasi program rehabilitasi psikososial bagi korban gempa bumi yang secara khusus diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan menggunakan kerangka teori optimalisasi H. Siringoringo (2005). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada bentuk kegiatan trauma healing, peran komunitas, atau ketahanan mental penyintas, penelitian ini menempatkan program rehabilitasi psikososial sebagai sebuah kebijakan publik yang dianalisis dari sisi tujuan program, alternatif keputusan yang diambil, serta keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah daerah.

Kebaruan lain terletak pada kombinasi antara analisis kebijakan dan pengalaman langsung korban, asisten rehabilitasi psikososial, serta perangkat kelembagaan seperti Dinas Sosial dan BPBD di satu lokasi spesifik, yaitu Kota Bengkulu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan proses pendampingan psikososial, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk dengan menggunakan bantuan perangkat analisis seperti NVivo untuk memetakan dimensi dan indikator yang relevan.

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi optimalisasi program, mulai dari penguatan alokasi anggaran yang berkelanjutan, pemenuhan tenaga profesional psikososial, hingga integrasi program rehabilitasi ke dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah. Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap upaya optimalisasi program rehabilitasi psikososial dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah yang konkrit, bukan sekadar mendeskripsikan kegiatan pendampingan atau pengalaman psikologis korban.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi program rehabilitasi psikososial bagi korban bencana gempa bumi di Kota Bengkulu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, dan tingkat optimalisasi program rehabilitasi psikososial bagi korban bencana gempa bumi di Kota Bengkulu. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena mampu menangkap makna, pengalaman emosional langsung dari para penyintas, serta kendala faktual dari pelaksana kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya menggunakan angka numerik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang terdiri dari wawancara mendalam dengan pedoman umum, observasi catatan lapangan, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan memilih individu yang memiliki tingkat pengetahuan, kewenangan, serta pengalaman langsung yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini melibatkan 10 orang warga terdampak gempa bumi di wilayah Betungan sebagai representasi penerima manfaat langsung. Sementara itu, yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bengkulu serta dua orang Pendamping Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial (Sentra Dharma Guna). Alasan penentuan informan kunci ini adalah karena merekalah yang memegang wewenang kebijakan sekaligus menjadi pelaksana/pionir utama yang berhadapan langsung dengan korban di lapangan. Selain itu, dilibatkan pula Kepala Bidang Logistik BPBD Kota Bengkulu untuk memperoleh gambaran utuh dari sisi koordinasi kedaruratan lintas sektor.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana pendamping, dan warga terdampak, serta triangulasi teknik yang menyilangkan hasil wawancara, observasi kondisi di lapangan, dan dokumen resmi untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara teknis, proses analisis data kualitatif ini dibantu menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Penggunaan tools NVivo 15 dilakukan melalui tahapan memasukkan data transkrip wawancara dan catatan lapangan, melakukan proses coding berdasarkan dimensi Teori Optimalisasi H. Siringoringo, hingga memvisualisasikan hasil analisis dalam bentuk word tree, word cloud, dan hierarchy chart untuk memetakan pola hubungan antar-temuan secara sistematis dan komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan lokus pengumpulan data yang difokuskan pada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, serta posko pengungsian dan permukiman warga terdampak gempa di wilayah Betungan. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data ini dilangsungkan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai bulan November 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup keseluruhan proses observasi lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam, dan penghimpunan dokumentasi terkait..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemulihan Psikis dan Sosial Korban

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu secara umum berhasil mencapai tujuan pemulihan psikis dan sosial penyintas gempa Betungan 23 Mei 2025 dalam jangka pendek. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 10 warga terdampak, sekitar 8 dari 10 responden (±80%) melaporkan berkurangnya gejala trauma seperti kecemasan berlebihan, gangguan tidur, dan kecenderungan menarik diri setelah mengikuti rangkaian kegiatan trauma healing, konseling kelompok, dan home visit yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, pendamping rehabilitasi psikososial Kementerian Sosial, serta mitra terkait.

Pengalaman subyektif korban menguatkan data tersebut. Hasil data wawancara Masyarakat terdampak menggambarkan bahwa getaran truk yang sebelumnya memicu kepanikan kini tidak lagi menimbulkan ketakutan setelah ia mengikuti sesi konseling kelompok dan simulasi kesiapsiagaan bencana. Data wawancara dari Masyarakat lain menyatakan emosinya lebih terkendali, anak mereka tidak lagi menangis di malam hari dan menjadi lebih ceria setelah mengikuti permainan dan aktivitas rekreatif bersama tim psikososial. Indikator peningkatan kualitas hidup tercermin dari kemampuan korban untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, berinteraksi sosial, dan menunjukkan rasa

syukur atas dukungan yang diterima. Pernyataan dari wawancara warga terdampak menilai bahwa hidup "sudah berjalan normal" meski masih harus menata kembali kondisi pascabencana.

Tingkat kepuasan warga terhadap layanan rehabilitasi psikososial juga relatif tinggi. Dari 10 responden, 9 orang (±90%) menyatakan puas dengan pendekatan layanan yang dinilai humanis, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Masyarakat mengaku merasa "terbantu" karena konseling kelompok membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian menghadapi dampak bencana, Masyarakat menilai materi simulasi kesiapsiagaan dan diskusi lapangan cukup profesional meskipun mengkritik keterlambatan dalam proses pendataan administratif. Padahal, untuk mengatasi kelambatan semacam ini, tujuan utama pemerintah daerah mengadopsi teknologi informasi sejatinya adalah untuk menyederhanakan proses administrasi bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Madjid et al., 2024). Meskipun demikian, secara kedeluruhan masyarakat mengapresiasi kegiatan memasak bersama dan menyarankan penambahan aktivitas produktif, seperti berkebun, untuk memperkuat keberlanjutan manfaat sosial program.

Gambar 3.1
Visualisasi Word Tree Kata Membantu

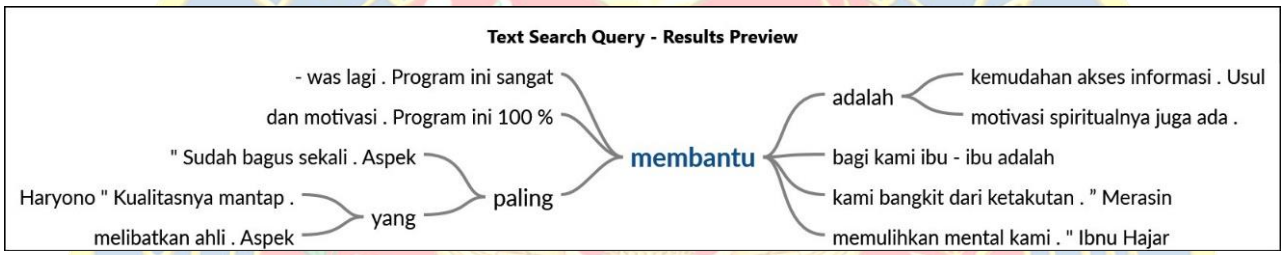

Sumber: Diolah Penulis melalui Aplikasi Nvivo 15

Berdasarkan hasil visualisasi Word Tree Nvivo, dalam data wawancara Bersama warga terdampak menghasilkan hasil kepuasan. Dapat dilihat dari kata membantu banyak terhubung dan dikatakan oleh warga. Temuan ini selaras dengan teori optimasi H. Siringoringo yang menempatkan kejelasan tujuan dalam hal ini pemulihan psikis, kepuasan layanan, dan peningkatan kualitas hidup sebagai fondasi utama evaluasi program.

3.2 Strategi Program dan Alternatif Keputusan

Dari perspektif dimensi "alternatif keputusan" dalam teori optimalisasi, program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu menunjukkan penggunaan strategi yang adaptif terhadap kondisi lapangan dan keterbatasan sumber daya. Strategi utama yang digunakan meliputi trauma healing berbasis permainan untuk anak, konseling kelompok bagi orang dewasa, kunjungan rumah *(home visit)*, serta penyediaan posko layanan terpadu di lokasi pengungsian Rafflesia Asri selama tujuh hari pascagempa. Data wawancara dengan pendamping Rehsos dan pejabat Dinas Sosial mengindikasikan bahwa pilihan strategi ini didasarkan pada asesmen awal perangkat RT/RW dan lurah mengenai kebutuhan psikososial warga di wilayah terdampak. Secara fungsional, keterlibatan tokoh masyarakat di tingkat dasar ini sangat krusial, mengingat posisi pemimpin informal lokal seperti tokoh adat, agama, dan masyarakat kerap kali menjalankan peran layaknya paralegal atau wakil pemerintah di tingkat desa dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa maupun krisis kemasyarakatan di luar sistem pengadilan (Pitono et al., 2023). Trauma healing untuk anak kemudian dilaksanakan melalui kegiatan bermain, menggambar, bernyanyi, dan permainan edukatif yang dirancang untuk menyalurkan emosi, mengurangi ketegangan, dan membangun kembali rasa aman. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif menurunkan kecemasan anak dan membantu mereka kembali berinteraksi secara wajar dengan teman

sebaya. Untuk orang dewasa, konseling kelompok dinilai lebih efisien ketimbang konseling individual mengingat keterbatasan tenaga profesional; dalam forum ini, korban saling berbagi pengalaman, menerima penguatan psikologis, dan mendapatkan informasi praktis terkait penanggulangan bencana.

Posko layanan di pengungsian berfungsi sebagai pusat koordinasi utama untuk penyaluran bantuan fisik dan psikis, yang didukung oleh kolaborasi antara Dinas Sosial, Kemensos (Sentra Dharma Guna), BPBD, dan Polri. Posko dibuka sehari setelah gempa dan aktif selama sekitar tujuh hari, melayani lebih dari 800 jiwa berdasarkan data BPBD dan Dinas Sosial. Meskipun efektif sebagai respon cepat, observasi mencatat bahwa kepadatan *(overcrowding)* di posko kadang mengganggu privasi dan kenyamanan korban, sehingga muncul rekomendasi agar ke depan posko dikombinasikan dengan layanan mobile yang bergerak dari rumah ke rumah. Dalam kerangka teori Siringoringo, rangkaian strategi ini menunjukkan bagaimana pengambil kebijakan memilih opsi-opsi yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan pemulihan, dengan tetap mempertimbangkan kendala faktual di lapangan.

3.3 Keterbatasan Sumber Daya dan Implementasi Keberlanjutan

Dimensi ketiga dalam teori optimalisasi, yakni "sumber daya yang terbatas", menjadi titik lemah utama dalam program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu, terutama bila dilihat dari perspektif keberlanjutan jangka menengah dan panjang. Padahal, sumber daya manusia memainkan peran aktif dan sentral dalam setiap kegiatan kelembagaan, karena mereka bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan penggerak utama dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Jalaludin, 2024). Penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak memiliki tenaga psikolog anak permanen dan kapasitas pekerja sosial dengan spesialisasi trauma pascabencana masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan rehabilitasi psikososial pasca gempa Betungan sangat bergantung pada pendamping pusat dari Kementerian Sosial dan dukungan relawan lintas instansi. Informasi dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan pendamping Rehsos menunjukkan bahwa total 23 pendamping gabungan diturunkan untuk menangani bencana skala lokal ini, jumlah yang relatif cukup untuk respon awal namun berpotensi tidak memadai bila skala bencana lebih besar atau terjadi secara berulang.

Keterbatasan dana menjadi kendala struktural lain yang menghambat optimalisasi program. Di tingkat Dinas Sosial, belum terdapat alokasi anggaran khusus yang berkelanjutan untuk kegiatan rehabilitasi psikososial, sehingga berbagai aktivitas trauma healing dan dukungan psikis banyak mengandalkan donasi spontan masyarakat serta bantuan logistik dari Kemensos. Hal ini membuat program cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek; misalnya, posko layanan hanya beroperasi selama tujuh hari, sementara kebutuhan pendampingan psikologis warga sebenarnya berlangsung lebih lama. Ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal menciptakan kerentanan karena tidak ada jaminan kontinuitas bantuan serupa pada bencana berikutnya.

Fasilitas rehabilitasi psikososial permanen juga belum tersedia di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Program pascagempa mengandalkan posko darurat dan peminjaman fasilitas dari instansi lain, sehingga setelah korban kembali ke rumah atau tinggal sementara di tempat kerabat, akses terhadap layanan konseling berkala menjadi terbatas. Warga mengusulkan adanya pusat konseling tetap atau layanan konseling keliling (mobile) yang dapat menjangkau gang-gang pemukiman untuk memastikan pendampingan jangka panjang bagi korban. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian lain di bidang rehabilitasi sosial yang menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas tetap dan tenaga ahli lokal menghambat konsistensi layanan psikososial pascabencana.

Gambar 3.2
Visualisasi Hierarcy Chart Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program



Sumber: Diolah Penulis melalui Aplikasi Nvivo 15

Hasil Analisa aplikasi Nvivo 15 menunjukkan bahwa permasalahan keterbatasan ketersediaan tenaga professional mendapat ruang paling besar dari pada keterbatasan dana (yang menjadi kedua terbesar), dan fasilitas yang kurang (menjadi yang terkecil). Dapat disimpulkan bahwa kendala yang paling berpengaruh pada program psikososial ialah kurangnya ketersediaan tenaga ahli sosial & psikolog.

Bila dianalisis dalam kerangka teori H. Siringoringo, penggunaan dana donatur dan bantuan pusat memang menunjukkan upaya optimalisasi sumber daya terbatas dalam jangka pendek, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan keberlanjutan. Untuk mencapai tingkat optimalisasi yang lebih tinggi, diperlukan intervensi kebijakan berupa: alokasi anggaran rutin minimal persentase tertentu dari belanja penanggulangan bencana daerah untuk program psikososial, rekrutmen psikolog lokal dan pelatihan pekerja sosial dalam *Psychological First Aid* (PFA), serta integrasi program rehabilitasi psikososial ke dalam Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD). Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan donatur, sekaligus mengubah program yang semula bersifat darurat menjadi layanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan apa pun yang terkait dengan pengurangan risiko bencana perlu menerapkan pendekatan yang terarah, partisipatif, dan cenderung komunal agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung kepada pemerintah, melainkan secara aktif mengalami peningkatan kapasitas (Putri et al., 2024).

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program rehabilitasi psikososial di Kota Bengkulu terbukti memberikan dampak positif dalam memulihkan kondisi psikis 80% penyintas gempa. Sama halnya dengan temuan penelitian Anggun Fergina et al. (2024) dan Yudha et al. (2025), pendampingan melalui pendekatan play therapy dan dukungan komunitas sangat efektif dalam mengurangi tekanan psikis korban, khususnya anak-anak.

Temuan ini memperkuat penelitian Firmansyah et al. (2023) bahwa kecepatan dan keberhasilan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada sinergi lintas instansi, yang dalam hal ini terwujud melalui kolaborasi Dinas Sosial, Kemensos, BPBD, dan Polri. Di sisi lain, sejalan dengan kajian Putra dan Rahmat (2025), tantangan terbesar program ini adalah keterbatasan tenaga profesional dan

ketiadaan alokasi anggaran khusus. Hal ini dikonfirmasi secara empiris melalui visualisasi Hierarchy Chart NVivo 15, di mana "Ketersediaan tenaga profesional" menjadi kendala lapangan yang paling dominan. Kondisi faktual ini menolak anggapan bahwa penanganan kedaruratan semata sudah cukup, sekaligus menegaskan urgensi pelembagaan program rehabilitasi yang didukung alokasi APBD tetap agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung yang sangat menarik dalam pelaksanaan program ini, yaitu tingginya tingkat solidaritas dan kepedulian masyarakat Kota Bengkulu. Ketiadaan anggaran khusus dari Dinas Sosial berhasil ditutupi secara darurat melalui sumbangan spontanitas dari para donatur lokal (non-budgeter). Bantuan donatur ini memegang peranan krusial dalam penyediaan suvenir dan logistik yang sangat dibutuhkan untuk menyukseskan metode terapi bermain bagi anak-anak di pengungsian. Di sisi lain, penulis juga menemukan faktor penghambat utama di luar aspek psikososial, yakni lambatnya proses pendataan administratif dan validasi korban oleh pihak terkait. Keluhan dari sebagian besar warga terdampak menunjukkan bahwa keterlambatan data ini memicu tersendatnya penyaluran bantuan perbaikan rumah, yang pada akhirnya sempat menambah kecemasan warga di tengah upaya mereka untuk bangkit dari trauma.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi psikososial bagi korban gempa bumi di Kota Bengkulu telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan kondisi psikologis dan sosial warga terdampak. Melalui berbagai kegiatan seperti trauma healing berpusat pada anak, konseling kelompok, dan kunjungan rumah, banyak penyintas melaporkan penurunan gejala trauma, peningkatan rasa aman, serta kemampuan untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih stabil. Tingkat kepuasan terhadap layanan juga tergolong tinggi, yang terlihat dari apresiasi warga terhadap pendekatan pendampingan yang dinilai humanis, mudah diakses, dan dirasakan bermanfaat bagi keluarga mereka.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi program belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat keterbatasan yang cukup signifikan, terutama pada ketersediaan tenaga profesional, fasilitas pendukung, dan keberlanjutan pendanaan. Kondisi tersebut membuat beberapa layanan bersifat jangka pendek dan belum terintegrasi secara kuat ke dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan aspek perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi program rehabilitasi psikososial ke dalam dokumen perencanaan resmi agar manfaat yang telah dirasakan masyarakat dapat dipertahankan dan diperluas.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan melibatkan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh konteks bencana di Indonesia, melainkan lebih menggambarkan kondisi spesifik di Kota Bengkulu. Kedua, penelitian ini mengandalkan data yang dihimpun dalam rentang waktu tertentu setelah kejadian gempa, sehingga tidak seluruh dinamika jangka panjang, seperti perubahan kebijakan atau pergeseran prioritas anggaran, dapat terpantau secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini belum memasukkan perspektif kuantitatif yang dapat memberikan ukuran lebih sistematis mengenai tingkat perubahan kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Penggunaan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo memang membantu dalam memetakan

tema dan pola data, tetapi tetap bergantung pada kedalaman data yang diperoleh dan interpretasi peneliti. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi pembaca dalam menempatkan hasil penelitian dan saat merancang penelitian lanjutan.

Arah masa depan penelitian. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian di masa depan dapat diarahkan pada beberapa hal. Pertama, diperlukan penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi psikososial, misalnya dengan menyertakan instrumen pengukuran gejala trauma atau kualitas hidup korban dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pendekatan campuran ini diharapkan dapat memperkuat bukti empiris yang mendukung pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

Kedua, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus ke perbandingan antar daerah, sehingga terlihat bagaimana variasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan komunitas memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi psikososial di berbagai konteks bencana. Kajian yang lebih spesifik terhadap model pembiayaan, desain kelembagaan, serta integrasi program rehabilitasi psikososial ke dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah juga penting untuk dikembangkan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang program rehabilitasi psikososial yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai situasi bencana.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, serta para asisten rehabilitasi psikososial Kementerian Sosial yang telah memberikan izin, waktu, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian ini. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada seluruh warga terdampak gempa bumi di Kota Bengkulu yang bersedia menjadi informan dan dengan terbuka membagikan pengalaman serta pandangannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen dan pembimbing di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan bimbingan ilmiah, serta rekan-rekan sejawat yang turut memberikan masukan selama penyusunan penelitian ini. Segala dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam tersusunnya artikel ini dan diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan rehabilitasi psikososial di masa mendatang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggun Fergina, Alyanissa Putri Iskandar, Yanuar Faturrahman, & Riko Pebrian. (2024). Pendampingan Psikososial Dan Trauma Healing Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Sarmpad, Kecematan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Jurnal Abdi Nusa, 4(2), 182–188. https://doi.org/10.52005/ABDINUSA.V4I2.151

Bany-mohammed, M., Asim, S., Elalami, M., & Agrawal, D. K. (2025). Trauma , Stress , and Mental Health Outcomes. *Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders.*, *9*(5), 276–288. https://doi.org/10.26502/jppd.2572-519X0260

Çınaroğlu, M. (2025). *Effectiveness of psychological interventions for adult survivors of the 2023 Kahramanmara ¸ s earthquakes : a systematic review and meta-analysis*. *December*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1696103

Çınaroğlu, M., Yılmazer, E., Ahlatcıoğlu, E. N., Ülker, S. V., & Sayar, G. H. S. (2025). Psychological impact of the 2023 Kahramanmaraş earthquakes : a systematic review and meta-analysis of PTSD , depression , and anxiety among Turkish adults. *Front. Public Health*, *13*(1664212), 1–16. https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1664212

Firmansyah, R. L., Nurcahya, S. B., & Mariany, A. (2023). ANALISIS PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA BUMI KABUPATEN CIANJUR Risteruw. *Jurnal Sosio Dan Humaniora*, *2*(1), 154–166. https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.216

Hardy, A., Keen, N., Berg, D. Van Den, Varese, F., Longden, E., Ward, T., & Brand, R. M. (2024). Trauma therapies for psychosis : A state- - review. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice Published*, *97*(September 2023), 74–90. https://doi.org/10.1111/papt.12499

Jalaludin, S. (2024). *Evaluation of Human Resource Performance at the Regional Disaster Management Agency in West Nusa Tenggara Province*. *12*(2), 365–380. https://doi.org/10.33019/society.v12i2.712

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province Author: *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *16*(1), 48–61. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, & Baidhowah, A. R. (2023). INFORMAL INSTITUTIONS, GOVERNMENT REGULATORY FUNCTIONS, AND DEVELOPMENT OF GOVERNANCE STUDIES. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA*, *16*(2). https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana, Sekretariat Negara (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Details/4833

Putra, A. R., & Rahmat, H. K. (2025). Membangun Ketahanan Mental Pasca Bencana: Peran Dukungan Psikososial dalam Trauma Healing. Widya Holistika: Jurnal Riset Ilmiah dan Pengembangan, 1(1), 9–14. https://journals.hakhara-institute.com/index.php/WH/article/view/8

Putri, N. A., Sutiyo, S., Ristiani, I. Y., Supriatna, A., & Uluputty, I. (2024). *MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR*. *9*, 65–82. https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.65-82

Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *11*(3), 187–207. https://doi.org/10.29333/ejecs/2154

Saputri, N. E., & Wijaya, A. (2025). Proses Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Keluarga Terdampak Gempa Bumi di Desa Limbangan Sari. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 4(2), 63–73. https://doi.org/10.32734/ljsp.v4i2.21018 2(1), 37–40.

Siringoringo, H. (2005). Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007). https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/1.pdf